

**PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT MANDIRI  
MELALUI KADER SURABAYA HEBAT**

**Tjatur Ermitajani Judi**

Program Studi Magister Adminitrasi Publik,  
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Bali,  
[tjatur.ermitajani@unr.ac.id](mailto:tjatur.ermitajani@unr.ac.id);

**Tias Dwi Jusnita**

Program Doktor Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[tiasjusnita02@gmail.com](mailto:tiasjusnita02@gmail.com);

**Eric Harianto**

Program Magister Manajemen,  
Universits Ciputra, Surabaya  
[eric.harianto@ciputra.ac.id](mailto:eric.harianto@ciputra.ac.id);

**Nyoman Diah Utari Dewi**

Program Studi Magister Adminitrasi Publik,  
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Bali,  
[diah.utari@unr.ac.id](mailto:diah.utari@unr.ac.id);

**ABSTRAK**

Tujuan dari pengabdian ini adalah ingin mengetahui ada faktor pendorong dan penghambat apa saja dari kegiatan pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya melalui Kader KSH ini dan mengetahui bagaimana kedepan-nya atas kelanjutan peran Kader KSH, apakah masih bisa eksis dan relevan dengan kondisi waktu yang akan datang dan perubahan kepemimpinan. Pengabdian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yang dihasilkan dari observasi, dokumentasi dan wawancara dari informan, yakni Kader KSH sendiri di Kampu Gubeng Kertajaya. Hasil temuan dari tulisan ini adalah KSH adalah asset kampung yang memiliki instrument tepat untuk membantu permasalahan kesehatan dalam lingkungan masyarakat yang padat penduduknya, dengan system kekeluargaan yang kuat. KSH menjadi harapan banyak masyarakat selain menambah penghasilan dan pendapatan bagi KSH itu sendiri, juga meringankan beban masyarakat akan beban biaya dan hal-hal lain yang ada dalam masyarakat tentang masalah kesehatan ini. KSH sebagai jawaban dan aksi yang tepat, Pemerintah Kota Surabaya yang menjadikannya ujung tombak informasi dan transparasi kegiatan kesehatan, sangat diuntungkan sehingga efektifitas pelaksanaan kesehatan di Surabaya berjalan dengan lancar, feedback nya cepat untuk dilakukan Analisa, dan memudahkan sebuah kebijakan manakala dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari feedback KSH ini.

**Kata kunci:** *Program, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Mandiri, Kader Surabaya Hebat.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial yang terus-menerus tanpa terputus, saling mempengaruhi, dan memiliki rasa yang sama, seperti saling membantu, bekerja sama, memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama-sama, terorganisir serta dapat mencapai dalam pemenuhan kebutuhan dalam suatu kelompok dan dapat membentuk solidaritas diantara anggotanya. Kelompok ini terjadi dan terbentuk di dalam lingkungan keluarga, pertemanan, komunitas, rekan kerja, dan didalam rukun tetangga. Misalnya, pada rukun tetangga yang didalamnya terdapat interaksi sosial yang saling berpengaruh satu sama lain, saling ketergantungan, saling membantu dan berinteraksi sosial terus-menerus tanpa terputus. Pada lingkungan sosial rukun tetangga terkadang juga dapat terbentuk lagi kelompok didalamnya, seperti kelompok ibu-ibu PKK, kelompok bapak-bapak ronda, karang taruna, dan bisa terbentuk kelompok-kelompok baru lagi didalamnya yang dapat terjadi sesuai dengan kebutuhan dalam kelompok rukun tetangga tersebut.

Seperti halnya pada Kader Surabaya Hebat atau yang disingkat menjadi KSH ini merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2021 dan di SK-kan langsung oleh Wali Kota Surabaya, yakni Bpk. Eri Cahyadi. KSH ini adalah kelompok yang terbangun karena memiliki kontribusi sosial aktif dan saling membantu serta bergotong-royong dalam menuntaskan masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat. Mereka terbentuk dari kelompok perempuan yang terdapat di setiap Rukun Tetangga (RT) di Surabaya. Mereka memiliki tugas untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam membantu masyarakat akan sadar tentang kesehatan. Misalnya, di setiap RT kelompok ini membantu dalam pencatatan balita yang mengalami stunting, pencatatan ibu hamil, pencatatan rutinitas pemeriksaan ibu hamil, membantu memberikan solusi untuk anak penderita stunting, membantu memberikan solusi untuk ibu-ibu hamil tentang gizi, pemeriksaan, kelahiran dan lain-lain, pencatatan warga terkait kepemilikan BPJS, lansia, serta tidak hanya itu saja, mereka juga banyak membantu warga dalam bidang kesehatan. Program pemberdayaan masyarakat sepenuhnya membutuhkan kesadaran, partisipasi dan peraturan yang jelas demi kelancaran dan kemandirian program bagi manfaat masyarakat.

Para KSH ini sangat membantu Pemerintah Kota Surabaya karena jika tidak ada campur tangan mereka atau kontribusi mereka sebagai Kader KSH sebagai penyambung lidah informasi tentang kesehatan masyarakat dan membantu jalannya program masyarakat, Pemerintah tidak akan tahu perkembangan terkait kesehatan di lingkungan kecil masyarakat, dan bahkan pemerintah akan kualahan jika tanpa bantuan mereka. Maka dari itu Pemerintah Kota Surabaya sangat mengapresiasi para kader ini dan melegalkan kelompok ini, karena mereka benar-benar melakukan dengan tulus dan sebagai panggilan hati, agar warga didalam lingkungannya mendapatkan ilmu, pengalaman, dan informasi terkait kesehatan, sehingga tidak tertinggal dan mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah melalui tangan kader-kader ini terkait dengan kesehatan. Kegiatan KSH ini akan terus dilanjut oleh Pemerintah Kota Surabaya dan akan terus mengapresiasi kader-kader ini sehingga tidak terputus gerakan ini agar masyarakat sadar dan akan terus

peduli tentang kesehatan. Tidak hanya itu, dengan adanya kelompok dan gerakan ini pemerintah bisa terbantu dalam penyelesaian persoalan di masyarakat. Fungsi *partnership* atau masyarakat sebagai mitra bagi pemerintah dalam hal pemberdayaan sepenuhnya berlaku dalam hal ini, sehingga program pemberdayaan ini lebih tepatnya dari masyarakat untuk masyarakat, dimana peran pemerintah sebagai eksekutif memberikan legalitas kepatuhan dan peraturan yang mengayomi terlaksananya pemberdayaan ini secara optimal.

Sesuai dengan kebijakan dan arahan Wali Kota Surabaya semua kader akan mendapatkan apresiasi tanpa terkecual, dan jika ada beberapa kader yang belum terdaftar dalam (Surat Keputusan) SK yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka mereka wajib di SK-kan dan segera mendaftar ke Kelurahan setempat agar tercatat dalam SK di tahun berikutnya. Bapak Eri Cahyadi juga berpendapat bahwa selama ini Wali Kota Surabaya juga menekankan kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kota Surabaya untuk membangun, memajukan serta mensejahterakan masyarakat dengan gotong-royong dan kekeluargaan kepada seluruh warga Kota Surabaya melalui kader-kader hebat ini, karena mereka terbentuk dan menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya. Pendekatan yang dilakukan oleh pejabat nampak jelas memberikan kepastian atas siapa saja yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan ini, baik dari kelompok dan komunitas masyarakat yang menganggap perlu adanya partisipasi dan kesadaran atas terselenggaranya jaminan Kesehatan yang bersifat preventif atau aduan, mengacu pada realisasinya layanan call centre 112 untuk masyarakat Surabaya.

Namun, jika dilihat dari sejarah Kota Surabaya, sebenarnya Kader KSH ini sudah terbentuk ketika Surabaya dibawah pemerintah Ibu Tri Rismaharini, akan tetapi terkait dengan kejelasan peraturan atau regulasi tentang kader KSH ini masih belum diketahui, dan akhirnya ketika pemerintahan dilanjutkan oleh Bapak Eri Cahyadi, maka membuat sebuah Keputusan atau SK terkait kelegalan Kader KSH tersebut. Dengan adanya hal itu, Bapak Wali Kota Surabaya tidak ingin kader-kader ini sampai tidak legal atau tidak ada peraturan atau payung hukum karena dengan adanya Kader ini Pemerintah Kota Surabaya sangat terbantu karena sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat Kota Surabaya dan kader sebagai penyambung informasi dan bantuan pemerintah kepada masyarakat Kota Surabaya. Maka dari itu, Wali Kota Surabaya sangat menjunjung Kader-Kader ini dan mengapresiasinya. Hal ini dilakukan setelah melihat animo masyarakat yang cukup perhatian atas terselenggaranya layanan Kesehatan preventif dimana saat di zaman Ibu Tri Rismaharini sebagai pengagas dan memulai konsep kemandirian pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan ini semakin nyata harapan dan partisipasi masyarakat, sehingga sebagai penerus dari Ibu Tri Rismaharini yaitu Bapak Eri Cahyadi, menganggap penting untuk segera melegalisasikan dan memberikan pengakuan bagi kader tersebut. Salah satu yang menjadi pertanyaan kelak, dimana legalitas Peraturan Walikota No : 14/2022 yang disahkan oleh Bapak Walikota Surabaya Eri Cahyadi ini mengacu pada Peraturan Walikota no 76 yang diterbitkan 2015 dan No 43 yang diterbitkan di tahun 2016, yang mana jika akan ada pergantian Walikota Surabaya di pemilihan kelak, keberadaan Kader Kesehatan Surabaya pun masih perlu dipertanyakan. Secara otomatis akan dipertimbangkan tergantung dari prioritas belanja anggaran APBD

dan terpengaruh dengan tinggi rendahnya penerimaan APBD dari Kota Surabaya. Karena nya tidak ada dalam aturan yang menyebutkan tentang masa berlakunya Kader Surabaya Hebat ini, yang pembiyaannya sepenuhnya menjadi honorarium yang diterima oleh Kader Surabaya Hebat. Sehingga selain menambah lapangan pekerjaan, tentu menjadi lahan pengharapan banyak orang yang menjadi kadernya, dan kewaspadaan yang harus disadari akibat dari tidak adanya kepastian masa berlaku dan program sepenuhnya bergantung pada Walikota Resiko dan dampak social yang akan ditimbulkan manakala peran Kader Surabaya Hebat sudah tidak lagi dianggarkan dalam APBD Kota Surabaya.

Melihat hal tersebut, sebagai seorang Kader juga tidak mudah dan pasti menemui banyak tantangan dan rintangan dalam pengabdianya di masyarakat. Tantangan dan rintangan tersebut bisa datang dari warga dan lingkungannya, ketua RT, dan lain sebagainya. Misalnya terkait dengan stunting, warga diberi penjelasan dan juga edukasi terkait stunting terkadang ada warga yang tidak mau didata, tidak percaya dengan kader yang sedang bertugas ketika memberikan edukasi, berasumsi yang tidak-tidak dengan para kader, dan lain-lain, sehingga para kader juga membutuhkan usaha yang ekstra kepada masyarakat ketika memberikan edukasi terkait hal tersebut agar masyarakat juga sadar akan stunting dan kesehatan.

Pembekalan dan SOP Kader Surabaya Hebat juga merupakan bagian penting pelaksanaan yang menjadi serius, karena Kader Kesehatan Surabaya adalah ujung tombak bagi Pemerintah Surabaya dan jembatan yang menghubungkan antara peran eksekutif dan tanggung jawabnya dan peran kemasyarakatan yang merupakan penerima manfaat dari kebijakan eksekutif ini. Karakteristik dan performance Kader Kesehatan Surabaya sangat menentukan kesuksesan dan kelancaran program pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada komunikator antar sesame pihak yang saling terkait. Misalnya, berhubungan dengan per rumah sakitan, tentang kendala lingkungan yang terkait pengaruh limbah dan air bersih di perkampungan yang berdampak pada Kesehatan masyarakat Surabaya. Tentu dalam hal ini Kader Kesehatan Surabaya jelas memiliki pembekalan yang matang dalam menghadapinya, dimana Kader Kesehatan Surabaya itu sendiri diposisikan sebagai Sumber Solusi bagi masyarakat di bidang Kesehatan dan lingkungan. Jadi penguasaan tentang penyakit umum yang di derita oleh masyarakat dan kondisi lingkungan sangatlah berperan penting atas percepatan pengambilan alihan informasi bagi mereka.

Maka dari itu, Kader KSH ini merupakan kelompok masyarakat yang sangat luar biasa dan hebat, karena tanpa mereka Pemerintah tidak akan pernah tahu permasalahan yang dialami oleh warga Surabaya, dan masyarakat juga tidak akan mendapatkan edukasi ataupun fasilitas terkait kesehatan dengan mudah tanpa campur tangan Kader KSH ini. Feedback inilah yang akan berperan untuk memberikan masukan dan Analisa atas data fakta yang diperlukan untuk Analisa sebuah kebijakn lanjutan. Kebijakan lanjutan bisa bersifat persuatif aktif atau persuatif pasif, bisa dengan tetap seperti ini untuk dilanjutkan, juga bisa ada penambahan. Namun perlu dipahami pentingnya sebuah efektifitas kebijakan yang mengiginkan masyrakat maju mandiri dan berwawasan luas yang sangat beradaptasi dengan peranan dunia digital modern, hal ini bisa menjadi pertanyaan

tersendiri untuk dikaji dan diteliti Kembali di kemudian hari. Dengan adanya hal tersebut maka penulis memiliki tujuan ingin mengetahui ada faktor pendorong dan penghambat apa saja dari kegiatan pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya melalui Kader KSH ini dan bagaimana kedepannya atas kelanjutan peran Kader KSH apakah masih bisa eksis dan relevan dengan kondisi waktu yang akan datang dan perubahan kepemimpinan. Penulis dalam melakukan pengabdian masyarakatnya ini berkontribusi memberikan pelatihan umum mengelola tugas tanggung jawab KSH menjadi professional dengan ukuran kecepatan dan ketepatan tindakan, serta pendampingan KSH dalam menjalankan praktek tugasnya di lokasi Kampung Gubeng Kertajaya yang tepatnya di lokasi RT. 001 RW.001 yang merupakan kampung dengan penggerak program KSH cukup sukses berhasil menjaga kesehatan warga kampungnya melalui aksi cepat tepat jika ada permasalahan kesehatan yang dibutuhkan.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Tindakan merupakan realisasi dari implementasi yang menjadi rangkaian dari perencanaan apa saja yang menjadi kebijakan dan prioritasnya. Kebijakan public wajib dinikmati public karena menggunakan dana public.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.” WHO juga memberikan dasar bahwa Kesehatan juga merupakan Kesehatan social dimana masyarakat hidup disuatu komunitas social yang ada di lingkungannya. Lingkungan sangat mempengaruhi Kesehatan fisik dan mental.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pengertian kesehatan diartikan sebagai berikut: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini seolah menjelaskan lebih terperinci lagi dari pernyataan WHO tentang Kesehatan bukan merupakan bagian terpisah melainkan satu kesatuan yang sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Seorang yang sakit fisik dalam jangka waktu tertentu jika belum mendapatkan kesembuhan berpeluang juga mengalami Kesehatan mental. Begitu sebaliknya, bahkan akibat dari pola lingkungan yang buruk mengalami Kesehatan yang tidak baik baik juga bagi kesehatan mental dan fisik. Jika hal ini tidak teratasi tentu bisa menjadi Kesehatan social atau penyakit social di masyarakat.

Menurut Robert Bierstedt yang dilansir dari buku Antropologi dan Sosiologi Pendidikan (2021) karangan Erdinson Simbolon dkk, pengertian kelompok sosial

menurut Robert Bierstedt adalah kumpulan orang yang sadar untuk berhubungan satu sama lain, tetapi tidak terikat dalam organisasi. Kelompok social identic dengan suatu komunitas besar yang tidak terorganisir namun memiliki karakteristik dan kesamaan tertentu sehingga membentuk sebuah kelompok.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Pemberdayaan merupakan suatu alat yang dipergunakan menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Adanya tujuan ini yang dipergunakan oleh suatu legitimasi tentang kekuatan penguasa atau pemberdayaan yang dilakukan karena ada kuasa untuk melakukan kegiatan tersebut. Tujuan nya adalah terkait dengan suatu program atau kegiatan memberdayakan kelompok social ke arah yang lebih baik. Arah social yang lebih baik menjadi salah satu hal yang mendasari kebijakan – kebijakan dengan menggunakan sarana pemberdayaan.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadisebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kader Surabaya Hebat (KSH) ini adalah kelompok yang terbangun karena memiliki kontribusi sosial aktif dan saling membantu serta bergotong-royong dalam menuntaskan masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat. Meraka terbentuk dari kelompok perempuan yang terdapat di setiap Rukun Tetangga (RT) di Surabaya. Meraka memiliki tugas untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam membantu masyarakat akan sadar tentang kesehatan. Misalnya, disetiap RT kelompok ini membantu dalam pencatatan balita yang mengalami stanting, pencatatan ibu hamil, pencatatan rutinitas pemeriksaan ibu hamil, membantu memberikan solusi untuk anak penderita stanting, membanu memberikan solusi untuk ibu-ibu hamil tentang gizi, pemeriksaan, kelahiran dan lain-lain, pencatatan warga terkait kepemilikan BPJS, lansia, serta tidak hanya itu saja, mereka juga banyak membantu warga dalam bidang kesehatan.

Kader Surabaya Hebat merupakan cerminan sempurna atas reliasasi dari kumpulan teori yang menguatkan adanya hubungan interaksi kuat pada kelompok masyarakat dengan pemberdayaan melalui sector Kesehatan, Kesehatan menjadi

daya tarik kuat untuk memperkuat posisi kelompok masyarakat semakin mandiri, maju dan peduli satu sama lainnya dengan adanya pemberdayaan yang mempersatukan komponen ini. Kader Surabaya Sehat selain menjadi counter part Pemerintah Kota Surabaya dengan membantu pekerjaan – pekerjaan sosialnya , menjadi andalan bagi Pemerintah Kota Surabaya karena kesigapannya mengatasi masalah social yang menyangkut Kesehatan masyarakat. Kader Surabaya Sehat yang di dominasi oleh kaum perempuan dan pemberdayanya pun melibatkan perempuan menjadi lebih terbuka, komunikasi dinamis serta memiliki kedekatan.

### C. METODOLOGI

Pada pengabdian ini, penulis menggunakan metode pengabdian deskriptif kualitatif, maka data yang diperoleh secara mendalam, jelas dan spesifik. Dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka (mempelajari dari internet, dan referensi lainnya) selama dilapangan. Tidak hanya itu saja, penulis juga menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat dengan *Participatory Action Research (PAR)*. Pendekatan PKM dengan *Participatory Action Research (PAR)* merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan. Observasi dilakukan di beberapa titik area yang ada di kampung Gubeng Kertajaya yang tepatnya di lokasi RT. 001 RW.001 dengan deskripsi sebagai berikut:

Jumlah penduduk: 15,361 Jiwa

Jumlah KK: 5049 KK

Fasilitas yang dimiliki di kampung Gubeng Kertajaya ini adalah fasilitas yang



didapat selayaknya warga, yakni KTP/Kartu Domisili, pencatatan kematian, fasilitas sosial dikampung (terop, bantuan sosial kesehatan, sembako, BLT, dan lain sebagainya). Fasilitas ekonomi masyarakat masih standar, karena warga kampung tersebut rata-rata adalah pekerja.

Sumber: Wikipedia/Locator Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Namun, untuk warga yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan dari RT setempat untuk didata dan mendapat bantuan langsung dari Kelurahan Gubeng berupa bantuan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan juga sembako. Untuk jumlah KSH disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada dalam satu RT, dan biasanya ada 2-5 KSH sesuai dengan jumlah penduduknya. Jenis layanan di kampung Gubeng Kertajaya ini adalah layanan sosial yang seperti pencatatam

kependudukan, kesehatan, kondisi ekonomi, bantuan sosial, dan lain sebagainya yang wajar seperti pada kampung-kampung lainnya karena semua telah diatur oleh Walikota Surabaya, dan jika tidak sesuai apa yang didapat oleh warga, warga langsung melakukan protes kepada kader-kader atau pada ketua RT setempat agar segera mendapatkan hak atau fasilitas warga yang seharusnya. Sehingga ada penanganan langsung, agar warga di kampung Gubeng Kertajaya ini mendapatkan fasilitas yang memang mereka dapatkan. Dengan begitu implementasi Walikota dapat terlaksana dengan baik dan sesuai serta warga Kota Surabaya juga dapat sejahtera. Dari penjelasan di atas, penulis mengetahui situasi dan kondisi di kampung Gubeng Kertajaya tersebut karena penulis langsung mendatangi kampung ini secara langsung dan bertemu serta berinteraksi dengan Kader KSH secara langsung.

Dari hasil observasi tersebut di atas nampak jelas bahwa keberadaan KSH sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, support dari aparat kampung dan kemudahan fasilitas kampung yang bisa diakses oleh KSH apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang sangat mendesak untuk keselamatan nyawa dan Kesehatan jiwa seseorang, terlihat jelas ada kedekatan satu sama lain yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sifat kegotong royongan menjadi makna penting yang bisa diterapkan bagi arah pemberdayaan KSH

1. Responden observasi
2. Responden deep interview
3. Kapasitas responden
4. Kapasitas yang dilakukan deep interview
5. Flow chart cara kerja KSH

#### **D. HASIL PEMBAHASAN**

Kader Surabaya Hebat adalah suatu kelompok yang terorganisir yang dibentuk dari setiap Rukun Tetangga (RT) yang bertugas sebagai penyambung lidah terkait informasi, edukasi, serta fasilitas terkait tentang kesehatan kepada masyarakat Kota Surabaya dan kelompok ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh Walikota Surabaya dan berpayung hukum serta diapresiasi oleh Walikota Surabaya.

Para KSH ini bertugas mengabdikan kepada masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat tentang penyuluhan, dan hal-hal aktifitas yang terkait perihal stunting, lansia, ibu hamil, dan juga pengurusan BPJS Kesehatan. Mereka bergotong-royong dengan terjun ke dalam lingkungan masyarakat dan mencatat segala keluhan masyarakat terkait dengan kesehatan. Seperti pencatatan balita penderita stunting, pencatatan perihal pembaharuan informasi terkait perkembangan stunting, pencatatan terkait gizi buruk, ibu hamil, pemeriksaan dan pembaharuan informasi terkait pemeriksaan dan kondisi ibu hamil, lansia, serta pencatatan warga yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan dan juga membantu untuk mempermudah dalam pembuatan Kartu BPJS Kesehatan. Proses pencatatan ini dilakukan untuk memudahkan arus transformasi dan bekerjasama dengan pihak yang terkait dalam kampung tersebut. KSH juga tetap memerlukan edukasi yang berkelanjutan tentang adanya wawasan dan keilmuan penyakit-penyakit yang terjadi dalam masyarakat. Menyadari tentang sifat, karakter dan jenis penyakit

terkait sebagai penyakit tropis, wabah atau penyakit menahun dan jenis-jenis penyakit masyarakat lainnya dalam lingkungan sosial.

Dan hal tersebut di atas terbukti dengan ditemukannya faktor pendorong yang ditemui ketika pembentukan dan jalannya kelompok pemberdaya masyarakat KSH ini adalah melihat kurangnya edukasi terkait stunting, kesehatan gizi, ibu hamil, lansia, banyaknya warga yang menderita kurang gizi, belum sadar akan gizi dan kesehatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Pemerintah Walikota Surabaya membentuk KSH ini sebagai penyambung informasi dan membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam pencatatan, mengedukasi, memberikan informasi terkait pelayanan kesehatan dan penyambung pemerintah dalam memberikan bantuan dan juga fasilitas kesehatan kepada masyarakat Kota Surabaya. Dinas Kesehatan Surabaya menyadari hal ini dengan memberikan pengarahan secara berkala kepada KSH, dan KSH dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi kreatif dalam penyampaian kepada masyarakat, agar masyarakat sadar akan gizi dan kesehatan, terkoneksi dengan pemerintah, mendapatkan fasilitas kesehatan dan akses mudah terkait fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui KSH ini.

Faktor Penghambat yang ditemui adalah ketika ada sebagian warga yang ragu akan edukasi mereka, warga yang tidak mau dicatat, warga yang malu karena merasa anaknya menderita kurang gizi, stunting dan lain sebagainya, ada juga warga yang tidak mau tahu atau tidak peduli akan kesehatan, tidak paham perihal edukasi yang diberikan karena bahasa ataupun penyampaian informasi terkait kesehatan ketika dilapangan, memintah akses yang semudah-mudahnya tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya atau bisa dibilang semauanya sendiri, terhalang karena warga bukan warga asli atau pendatang di Surabaya, tidak paham akan jenis-jenis pelayanan KIS dengan BPJS Kesehatan, ibu-ibu hamil yang kurang pengetahuan dan informasi terkait edukasi perihal gizi, pendataan, pemeriksaan dan lain- lain terkait kehamilan namun malu untuk menyampaikan kepada kader, atau semisal dengan kendala hamil diluar nikah dan bahkan usia ibu hamil yang belum siap namun tidak mau menemui para Kader ini, maka dengan begitu membutuhkan usaha dari kader untuk mau mendorong mereka untuk peduli tentang kesehatan dan mendapat fasilitas kesehatan dari pemerintah secara mudah dan bahkan tanpa biaya. Maka, kerja keras, kerja sama serta gotong royong dari kader-kader ini supaya dapat memberikan semangat kepada warga untuk sadar akan kesehatan.

Faktor-faktor penghambat tersebut di atas menggambarkan adanya masyarakat yang bersifat terbuka akan adanya informasi dan layanan yang diberikan oleh KSH, tetapi juga ada yang resisten dengan berusaha menolaknya karena kurang kepercayaan atas kemampuan KSH ini. Koordinator KSH juga penting perannya, dimana KSH dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh tokoh kampung atau orang yang memiliki peran penting di kampung, supaya unsur keraguan bisa ditekan sehingga memperlancar tugasnya. Peran tokoh kampung dan para ibu-ibu PKK yang terkait sebagai penggerak kampung sangat sentral, memberikan unsur tunduk dan patuh, KSH secara legalitas membutuhkan hal tersebut.

Melihat kerja yang luar biasa dari Para Kader KSH ini maka kelanjutan dari KSH ini masih terus diperjuangkan oleh Walikota Surabaya karena tanpa adanya mereka pemerintah tidak tahu permasalahan terkait kesehatan yang sedang dialami oleh warga Kota Surabaya, dan tidak ada penyambung informasi terkait kesehatan kepada masyarakat, dan entah apa jadinya jika tidak ada kader-kader hebat ini. Sehingga Walikota Surabaya sangat mengapresiasi KSH ini dan akan terus dilanjutkan adanya pemberdayaan masyarakat yang seperti ini dengan Kader-Kader hebat ini. Dengan adanya kader-kader ini, maka KSH ini dijadikan panutan oleh kota-kota lain dan KSH ini juga dijadikan pembelajaran oleh kota-kota lain agar dapat mempraktekkan pemberdayaan masyarakat melalui kader KSH seperti ini di kota-kota lain. Dengan semakin banyaknya pihak luar yang ingin menulis dan melakukan kajian tentang KSH ini, Penulis mengharapkan adanya ketertarikan para pihak untuk membantu peningkatan skill dan nilai-nilai profesionalisme yang melekat pada KSH, sehingga KSH makin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, peran yang disandang KSH ini kian dirasakan masyarakat. Beban tanggung jawab ini tidak hanya di sektor pemerintah saja, lebih-lebih hal ini merupakan masalah social yang dirasakan oleh seluruh pihak, jadi memungkinkan untuk dijadikan sebagai bagian dari rencana CSR bagi institusi non pemerintah yang ada disekitaran kampung. Dengan begitu diharapkan banyak pihak yang tertarik untuk terus membuat kemajuan bagi lingkungan sosialnya.

#### **E. KESIMPULAN**

KSH adalah asset kampung yang memiliki instrument tepat untuk membantu permasalahan kesehatan dalam lingkungan masyarakat yang padat penduduknya, dengan system kekeluargaan yang kuat. Lingkungan sosial sangat menentukan kesuksesan KSH dalam menjalankan tugasnya, selain pentingnya pembekalan dari segala pihak, terutama pihak pemerintah yang terkoneksi langsung dengan tugas KSH. KSH menjadi harapan banyak masyarakat selain menambah penghasilan dan pendapatan bagi KSH itu sendiri, juga meringankan beban masyarakat akan beban biaya dan hal-hal lain yang ada dalam masyarakat tentang masalah kesehatan ini.

KSH sebagai jawaban dan aksi yang tepat, Pemerintah Kota Surabaya yang menjadikannya ujung tombak informasi dan transparasi kegiatan kesehatan, sangat diuntungkan sehingga efektifitas pelaksanaan kesehatan di Surabaya berjalan dengan lancar, feedback nya cepat untuk dilakukan Analisa, dan memudahkan sebuah kebijakan manakala dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari feedback KSH ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Locator\\_Kecamatan\\_Gubeng\\_di\\_Kota\\_Surabaya.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Locator_Kecamatan_Gubeng_di_Kota_Surabaya.png)
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/eri-cahyadi-berikan-insentif-kepada-kader-surabaya-hebat/>

<https://lenteratoday.com/surabaya-punya-27-540-kader-sehat-hebat-tingkat-kelurahan/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gubeng,\\_Surabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Gubeng,_Surabaya)

Islamy, M. Irfan, MPA, 1986, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara FIA. Unibraw, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948.

Peraturan Walikota No 76 yang diterbitkan tahun 2015 dan No 43 yang diterbitkan di tahun 2016 tentang tentang Pemberian Biaya Jasa.

Peraturan Walikota No: 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya.

Simbolon, Erdinson dkk. 2021. *Antropologi dan Sosiologi Pendidikan*.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan